

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Penelitian

Vaksin *Covid-19* merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk melawan dan menangani *Covid-19* yang sedang terjadi di dunia khususnya di Indonesia. Tujuan dari Vaksinasi *Covid-19* adalah untuk mengurangi penyebaran *Covid-19*, menurunkan angka pasien yang terpapar virus dan kematian yang disebabkan oleh *Covid-19*, mencapai kekebalan dan melindungi masyarakat dari *Covid-19*. Sehingga dapat menjaga masyarakat dan perekonomian (Kemenkes RI Dirjen P2P, 2020).

Di tengah lonjakan kasus *Covid-19* yang kian hari semakin melonjak memaksa pemerintah mengarahkan segala upaya untuk meredam lonjakan kasus *Covid-19*. Mulai dari gerakan 5M, pembatasan sosial antar daerah hingga proses Vaksinasi. Dari usaha pemerintah tersebut seiring berjalannya waktu, data kasus masyarakat baik itu kematian maupun orang yang terinfeksi *Covid-19* berangsur-angsur menurun dan mulai dapat dikendalikan. Butuh proses panjang bagi Pemerintah baik itu dari Kementerian Kesehatan maupun Pemerintah Daerah untuk dapat mengingatkan masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah.

Sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo bahwa salah satu tugas utama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin adalah percepatan pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19*, sebagai upaya memutus mata rantai penularan *Covid-19* di Indonesia. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi

Sadikin bergerak cepat dengan melakukan koordinasi dengan beberapa perusahaan penyedia vaksin diantaranya Sinovac, Novavax, AstraZeneca, Pfizer, dan COVAX.

Capaian Vaksinasi yang telah dicapai berkat usaha optimal dan gotong royong dengan semua pihak terutama TNI/Polri, pemerintah daerah, BUMN dan pihak swasta yang turut membantu. Kementerian Kesehatan terus berupaya meningkatkan percepatan Vaksinasi. Selain membuka Vaksinasi massal dengan bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, Kemenkes juga telah mengeluarkan Surat Edaran yang menginstruksikan seluruh pos pelayanan Vaksinasi seluruh Indonesia untuk melakukan Vaksinasi kepada semua target sasaran tanpa memandang domisili atau tempat tinggal pada KTP.

Saat ini masih banyak beredar berita simpang siur mengenai vaksin *Covid-19* di tengah masyarakat, terkhusus di daerah cakupan Vaksinasi *Covid-19* di Kecamatan Subang. Hal tersebut dapat menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mau divaksin. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan, manfaat Vaksinasi, dan efek apa yang akan ditimbulkan jika tidak melakukan Vaksinasi bisa menjadi penyebab lain masyarakat tidak mau divaksin. Oleh karena Pemerintah Kabupaten Subang memberikan arahan kepada dinas-dinas dibawahnya agar mengeluarkan regulasi yang bersifat memaksa, memaksa dalam artian kearah yang lebih baik. Sebagai contoh dijadikannya kartu Vaksinasi *Covid-19* sebagai prasyarat administrasi.

Menurut pengamatan penulis sebelum diadakan program Vaksinasi yang dijalankan oleh Puskesmas Sukarahayu partisipasi dari masyarakat untuk mengikuti Vaksinasi cenderung rendah, bahkan kurang dari sasaran yang sudah ditugaskan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Subang. masyarakat cenderung acuh dan tidak menanggapi covid-19 sebagai ancaman serius yang dapat merenggut nyawa. Akan tetapi setelah diadakan edukasi yang merata dan juga terdapat inovasi berupa program gebyar Vaksinasi, partisipasi dari masyarakat mulai meningkat dan mulai teredukasi bahwa jika tidak melaksanakan Vaksinasi *Covid-19* maka kekebalan massal (*herd immunity*) semakin sulit tercapai.

Pada dasarnya pemerintah memiliki tujuan baik dengan menjadikan kartu Vaksinasi sebagai syarat administrasi. Masyarakat berhak menentukan mau atau tidak divaksin, disisi lain pemerintah juga berhak mengatur aktivitas di tempat umum agar semua aman dan *Covid-19* terkendali. Petisi itu muncul dan mendapat dukungan karena ada sebagian masyarakat merasa mobilitasnya dibatasi dengan syarat kartu Vaksinasi. Syarat Vaksinasi dan penggunaan aplikasi peduli lindungi bertujuan agar masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi dan sosial dengan tetap aman. Orang yang berisiko tertular atau menularkan dapat dicegah beraktivitas di tempat umum.

Status ekonomi seseorang merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi penerimaan terhadap vaksin *Covid-19*, orang dengan status ekonomi yang menengah dan tinggi bersedia untuk di

vaksin. Namun, pada orang dengan status ekonomi rendah masih ragu-ragu akan efektifitas vaksin. Status ekonomi yang dimiliki seseorang mempengaruhi persepsi mereka terhadap vaksin *Covid-19*. Dimana diperlukannya edukasi yang cukup pada orang yang mempunyai status ekonomi menengah kebawah agar terbentuknya persepsi yang baik tentang vaksin *Covid-19*. Kemudian dalam hal ini pemerintah telah memberikan program Vaksinasi secara gratis kepada seluruh masyarakat sehingga untuk orang yang mempunyai status ekonomi menengah kebawah tidak perlu cemas mengenai biaya untuk melakukan Vaksinasi *Covid-19*. Jika masyarakat sudah mempercayai kemanan dan tingkat efektivitas vaksin *Covid-19*, tentu akan mempengaruhi tingkat kesediaan masyarakat untuk mengikuti anjuran Vaksinasi *Covid-19*.

Hal lain yang dikhawatirkan masyarakat sehingga enggan untuk divaksin adalah terkait pasca imunisasi. Hal yang ditakutkan sebagai contoh para penderita komorbid atau penyakit penyerta yang terpaksa di Vaksinasi agar bisa memasuki pusat perbelanjaan atau mall. Hal ini mengakibatkan para penderita komorbid diharuskan untuk mengikuti Vaksinasi karena terdesak kebutuhan. Pemerintah dalam hal ini diminta memberikan solusi lain dan diharapkan melakukan evaluasi terkait aturan administrasi yang berlaku saat ini.

Aturan tersebut berdampak negatif bagi orang tidak memenuhi syarat Vaksinasi. Di sisi lain, Vaksinasi *Covid-19* memang berjalan dengan baik dalam penanganan pandemi, namun pemerintah diminta

mempertimbangkan kebijakan yang dibuat agar adil dan transparan guna efektivitas Vaksinasi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Program Vaksinasi *Covid-19* di Kabupaten Subang makin gencar dilakukan dan mendapat dukungan dari berbagai pihak dan lintas sector bukan hanya dari Puskesmas Sukarahayu. Sebagai contoh di lingkup Polres Subang mulai mensyaratkan Vaksinasi sebagai salah satu syarat utama dalam pengurusan administrasi seperti pengurusan Surat Ijin Mengemudi (SIM), pengurusan laporan polisi serta laporan aduan dan laporan kehilangan. Hal ini yang membuat masyarakat mau tidak mau harus memiliki surat Vaksinasi untuk mengurus administrasi tersebut. Karena mau bagaimana pun SIM merupakan kebutuhan vital dan harus dimiliki bagi pengendara bermotor.

Dari data yang dihimpun dari petugas Vaksinasi *Covid-19* di Puskesmas Sukarahayu. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat untuk divaksin. Baik itu yang murni tidak ingin terjangkit virus *Covid-19* maupun karena desakan keterpaksaan. Keterpaksaan yang dimaksud disini adalah dari mulai regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang terkait soal surat vaksin yang menjadi surat sakti untuk mengurus hal-hal pengadministrasian sebagai syaratnya.

Menurut penuturan masyarakat setempat solusi Vaksinasi ini menimbulkan kontroversi bagi sebagian orang. Pertama, karena adanya keraguan pengembangan vaksin, dikarenakan waktu pengembangan

vaksin cukup singkat, sekitar satu tahun. Ini berbeda dengan vaksin lain yang mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun. Hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran masyarakat tentang efek samping atau dampak vaksin terhadap para penerima vaksin. Oleh karena itu penyebaran informasi yang tidak tepat akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap vaksin *Covid-19* dan dengan demikian mempengaruhi perilaku masyarakat. Keputusan dan pilihan yang diambil lebih didasarkan pada informasi dari internet, khususnya media sosial.

Ketidakpercayaan masyarakat tersebut berangsur-angsur mulai menyusut. Pada tahun 2021, Puskesmas Sukarahayu semakin meningkatkan kinerjanya dengan berbagai program yang dijalankan. Untuk mengejar capaian Vaksinasi, Puskesmas Sukarahayu setidaknya mempunyai 5 program prioritas. Program tersebut antara lain Gebyar Vaksinasi, Gebyar Ramadhan, Gebyar Disabilitas, Gebyar Lansia dan Program Jemput Bola. Kelima program tersebut dinilai efektif jika beracuan kepada rekapitulasi data yang dihimpun oleh Bidang Vaksinasi UPTD Puskesmas Sukarahayu.

Kenaikan tingkat Vaksinasi dari bulan ke bulan di tahun 2021 menjadi bukti bahwa kinerja dari tenaga kesehatan di lingkungan UPTD Puskesmas Sukarahayu terus di tingkatkan. Hal ini didasari oleh data yang dihimpun dari tim rekapitulasi Vaksinasi *Covid-19* UPTD Puskesmas Sukarahayu. Walaupun kenaikannya tidak konsisten tiap bulan akan tetapi jumlah partisipasi masyarakat dalam mengikuti

program Vaksinasi sudah berada diatas standar yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Subang.

Penelitian ini menggunakan Teori Struktur Fungsionalisme Talcott Parsons. Dijelaskan bahwa berbagai elemen dalam masyarakat saling bergantung satu sama lain dalam menjalankan fungsi sosial mereka. Korelasi penelitian ini terhadap teori struktur fungsionalisme Talcott Parsons adalah untuk memahami perubahan sosial. Dimana dalam hal ini fungsi dari Puskesmas Sukarahayu dalam meminimalisir penyebaran *Covid-19* dengan melakukan Vaksinasi *Covid-19* kurang efektif karena kurangnya atensi dari masyarakat.

Menurut hasil penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu Skripsi yang disusun oleh Hilda Kamilah Fitriah berjudul "*Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Masker Pada Masa Pandemi Covid-19*" bahwa dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran *Covid-19* dengan menggunakan masker. Dalam hal ini, skripsi yang disusun peneliti lebih membahas tentang program Vaksinasi *Covid-19* sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang penggunaan masker dilingkungan masyarakat. Dimana skripsi yang disusun peneliti lebih mengedepankan aspek upaya untuk memutus rantai penyebaran *Covid-19*, sedangkan skripsi penelitian terdahulu lebih kepada aspek sebagai upaya preventif dalam kata lain kurang efektif untuk meminimalisir penyebaran *Covid-19*.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya dapat disusun sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Peran yang dijalankan UPTD Puskesmas Sukarahayu dalam kegiatan Vaksinasi *Covid-19*?
- 2) Bagaimana Program UPTD Puskesmas Sukarahayu dalam meningkatkan minat masyarakat untuk Vaksinasi *Covid-19*?
- 3) Bagaimana Kendala yang dialami pada saat proses Vaksinasi *Covid-19* di UPTD Puskesmas Sukarahayu?
- 4) Bagaimana Upaya dan Manfaat Vaksinasi *Covid-19* bagi Masyarakat?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui Program yg dijalankan UPTD Puskesmas Sukarahayu dalam meningkatkan minat masyarakat untuk mengikuti Vaksinasi *Covid-19*;
- 2) Untuk mengetahui Peran UPTD Puskesmas Sukarahayu dalam meningkatkan minat masyarakat untuk Vaksinasi *Covid-19*
- 3) Untuk mengetahui Kendala yang dialami pada saat proses Vaksinasi *Covid-19*
- 4) Untuk mengetahui Upaya dan Manfaat Vaksinasi *Covid-19* bagi masyarakat.

### **1.4. Manfaat Hasil Penelitian**



Hasil penelitian diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, oleh karenanya penelitian ini diharapkan mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap program Vaksinasi, diantaranya:

a. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan mampu membantu mengedukasi masyarakat terkait tentang pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus pada fenomena yang terjadi pada masyarakat. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat terkait tentang kegiatan program Vaksinasi.

b. Kegunaan Praktis (Sosial)

Secara praktis, diharapkan penelitian ini berguna bagi masyarakat dan memberi pemahaman bahwasannya program Vaksinasi *covid-19* di realisasikan untuk melindungi masyarakat dari paparan virus dan sebagai tujuan utamanya yaitu untuk mencapai *herd immunity*.

Dapat disimpulkan bahwa adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun kegunaan bagi banyak orang. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu membuat masyarakat mengikuti anjuran untuk mengikuti program Vaksinasi agar memutus rantai penyebaran *covid-19* di lingkungan Kabupaten Subang khususnya di lingkup wilayah UPTD Puskesmas Sukarahayu di Kecamatan Subang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya virus *covid-19*.

## 1.5. Kerangka Berpikir

*Grand theory* yang diangkat dalam penelitian ini adalah Fungsionalisme Struktural yang di ilhami oleh Talcott Parsons. Parsons yakin bahwa terdapat empat fungsi yang diperlukan semua sistem, ia kemudian mendesainnya kedalam empat fungsi. Fungsi tersebut dikenal dengan skema AGIL yang di dalamnya memuat:

a. *Adaptation* (adaptasi)

Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem itu harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.

b. *Goal attainment* (pencapaian tujuan)

Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utama

c. *Integration* (integrasi)

Suatu sistem harus mengatur antar-hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L).

d. *Latency* (latensi atau pemeliharaan pola)

Sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Skema AGIL diatas diimplementasikan oleh Parson dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Organisme perilaku, merupakan suatu sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan mengubah lingkungan eksternal.
- b. Sistem kepribadian, yaitu melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya.
- c. Sistem sosial, menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponen-komponennya.
- d. Sistem kultural, dimana ikut melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan faktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak

Parsons menggunakan status-peran sebagai unit dasar dari sebuah sistem. Status mengacu pada posisi struktural di dalam sistem sosial sedangkan peran adalah apa yang dilakukan aktor dalam posisinya. Dalam hal ini, sistem sosial yang digagas oleh Parsons menggunakan interaksi sebagai unit fundamental dalam studinya.

Dalam analisisnya tentang sistem sosial, Parsons tertarik kepada komponen-komponen strukturalnya. Bukan hanya sebagai seorang strukturalis, ia juga memosisikan dirinya sebagai fungsionalis. Parsons menjelaskan beberapa persyaratan fungsional dalam sistem sosial, persyaratan tersebut antara lain:

- a. Pertama, sistem sosial harus terstruktur sedemikian rupa sehingga bisa beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya.
- b. Kedua, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, sistem sosial harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem lain.
- c. Ketiga, sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya dalam proporsi yang signifikan.
- d. Keempat, sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu.
- e. Keenam, apabila konflik akan menimbulkan kekacauan, maka harus dikendalikan.
- f. Ketujuh, untuk keberlangsungan hidupnya, sistem sosial memerlukan bahasa.

Korelasi teori sosiologi dengan teori islam yang relevan menurut pengamatan peneliti adalah konsep *Ta'awun*. Dalam pengertian sempit *Ta'awun* adalah suatu pekerjaan maupun perbuatan tolong-menolong antar sesama manusia yang didasari pada hati nurani dan semata-mata mencari ridha Allah Subhanallahuwata'ala.

Dalam hal ini, teori fungsionalisme struktural menitik beratkan bagaimana suatu sistem dalam masyarakat dapat saling berhubungan satu sama lain. Dengan demikian, hubungan ini akan mempengaruhi bagian-bagian lain yang bersifat timbal balik. Untuk menghasilkan hubungan timbal balik maka dibutuhkan sifat *ta'awun*.

Konsep ini diangkat dari QS Al-Mâ'idah ayat kedua yang berbunyi. "Saling tolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan".

Kaidah fungsionalisme ini sebenarnya merupakan keniscayaan dari hakikat eksistensi manusia yang memiliki saling ketergantungan. Manusia memang diciptakan dari ketergantungan, artinya manusia memiliki ketergantungan, baik secara biologis, sosiologis, maupun secara psikologis.

Selain dari adanya perbedaan derajat, keberadaan struktur terkandung secara eksplisit dari makna kata "*sukhriyya*". Pendapat Imam al-Raghib yang menyatakan bahwa "*sukhriyya*" mengandung makna orang yang memiliki otoritas untuk memperkejakan seseorang sehingga orang tersebut taat sesuai kehedaknya. Otoritas atau daya paksa yang memungkinkan seseorang tunduk dan patuh tentu bukan otoritas atau daya paksa yang mengandung unsur aniaya atau kedzaliman.

Mustahil Al-quran mengizinkan kedzaliman. Otoritas atau daya paksa yang mampu mempekerjakan seseorang secara patuh tersebut tiada lain adalah struktur yang terbentuk sebagai keniscayaan dari kebutuhan pengembangan dan kebersamaan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan dan cita-cita bersama. Itulah sebabnya Al-quran (QS. 5: 2) menyerukan secara tegas agar semua pihak mampu bekerja sama atas dasar takwa dan kebajikan.

Pengertian diatas semakin mempertegas bahwa untuk menjalin suatu struktur dalam masyarakat agar tersusun, maka didalam masyarakat tersebut harus terbagi kedalam sistem-sistem dan faktor-faktor yang satu sama lain mempunyai peran dan fungsinya masing-masing sehingga tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat dapat tercapai.

Selain konsep *ta'awun*, menurut pandangan penulis, terdapat korelasi antara pemikiran teori fungsionalisme struktural milik Talcott Parson dengan konsep perilaku *mukallaf* yang dicetuskan oleh Juhaya S. Pradja (2005 :59). Dimana teori *mukallaf* berkaitan dengan tiga potensi manusia yang secara fungsional saling berhubungan, sebagaimana Talcott Parsons mengatakan bahwa perilaku yang terinstitusikan adalah integrasi antara orientasi integral. Baik itu dalam dimensi kognitif, katektik, evaluatif, apresiatif maupun dimensi moral.

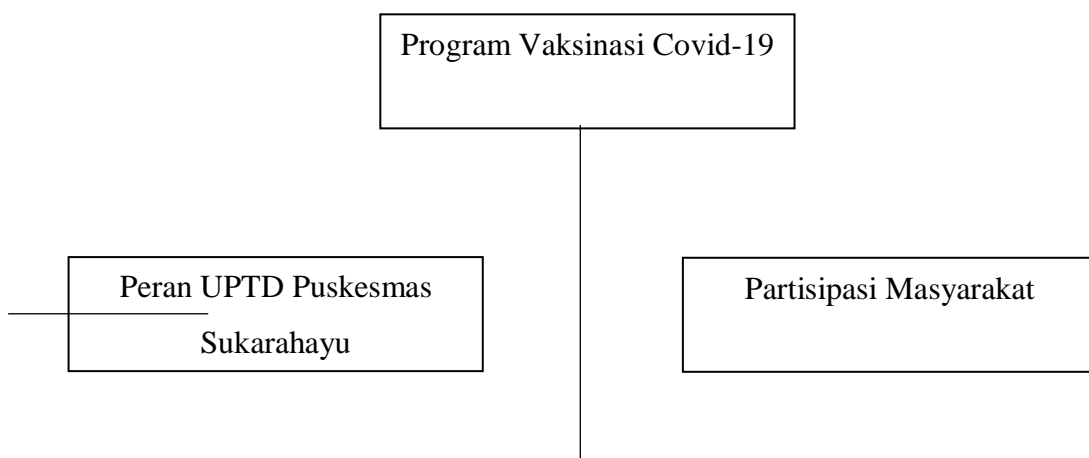
Dalam teori perilaku *mukallaf*, sebagaimana ditegaskan bahwa manusia adalah *human relation*, makhluk hidup yang saling berhubungan dan berinteraksi. Dengan demikian, maka manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendirian. Maka oleh karena itu, membentuk komunitas merupakan fitrah manusia itu sendiri.

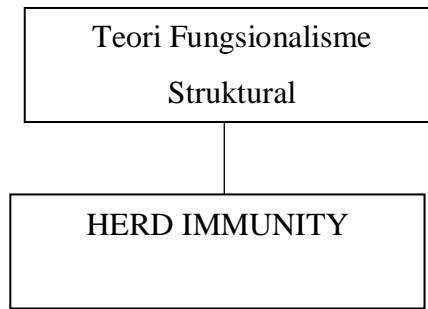
Dalam hal ini, Juhaya S. Pradja memahami dimensi-dimensi tersebut dengan istilah Teori Fitrah (*nadzariyyah al-Fitrah*). Teori ini dibangun atas pandangan Juhaya terhadap pemikiran Imam Gazali dalam *Ihya 'Ulimuddin* dan Ibnu Taimiyyah dalam *Dar' Ta'arud al-'Aql wa al-Naql*. Potensi manusia ada tiga macam, antara lain:

- a. Potensi akal (*quwwah al-'aql*) berfungsi mengenal, mengesakan dan mencintai tuhan
- b. Potensi syahwat (*quwwah al-syahwat*) berfungsi untuk menginduksi segala hal yang menyenangkan
- c. Potensi ghadab (*quwwah al-ghadab*) berfungsi untuk mempertahankan diri

Tiga dimensi tersebut jika dikaitkan dengan teori perilaku mukallaf dapat dipahami, bahwa ketiganya harus integral dan secara fungsional berjalan harmoni dan tidak saling bertentangan. Sebagaimana dalam fungsional struktural bahwa dimensi kognitif dalam orientasi motivasional berhubungan dengan kognitivitas dalam orientasi nilai, sedangkan dimensi katetik berhubungan dengan dimensi apresiasi, sebagaimana dimensi evaluatif berkaitan dengan dimensi moral.

**Gambar 1.1**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DIATI  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**





### **1.6. Permasalahan Utama**

Menurut kacamata pengamatan penulis, di wilayah Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Masyarakat tidak terlalu menanggapi *Covid-19* sebagai ancaman nyata yang dapat merenggut nyawa seseorang. Mereka terbilang acuh dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Alhasil, kasus *Covid-19* di Wilayah Kabupaten Subang mengalami kenaikan kasus yang signifikan.

Oleh karena itu UPTD Puskesmas Sukarahayu gencar melakukan program Vaksinasi, baik itu melalui sosialisasi di media sosial maupun secara langsung. Untuk mempermudah capaian atau target yang telah ditetapkan pemerintah, UPTD Puskesmas Sukarahayu melakukan kerja sama dengan lintas sektor dengan tujuan *herd immunity* semakin mudah tercapai dan wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukarahayu perlahan terbebas dari zona merah korban positif *Covid-19*.

### **1.7. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Hilda Kamilah Fitriah (2021) mahasiswa Jurusan Sosiologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Masker Pada Masa Pandemi *Covid-19*” kajian yang diteliti dalam penelitian untuk mengetahui kondisi masyarakat yang terdampak



pandemi *covid-19* serta cara untuk mengantisipasi paparan virus *covid-19* dengan cara memakai masker dan beberapa cara pencegahan lainnya. Adapun hasil akhir dari penelitian ini menyatakan bahwa persepsi masyarakat Desa Cinangneng mengenai covid yaitu percaya adanya virus *covid-19* namun tidak terlalu berbahaya seperti yang diberitakan di media, kemudian upaya pemerintah desa dalam mencegah penyebaran virus ialah dengan melakukan himbauan tentang protocol kesehatan dan mengawasinya dengan kegiatan operasi masker. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal kepercayaan masyarakat mengenai virus *covid-19*, yang membedakannya adalah jika dalam penelitian yang menjadi garis besar upaya preventif paling mudah dengan menggunakan masker sedangkan penelitian penelitilebih membahas tentang Vaksinasi *covid-19*.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Nisrina Nur Aini (2022) mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan Judul “Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan *Covid-19* melalui Program *Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK): Studi deskriptif di Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir Kota Bandung*”. Kajian dalam penelitian ini secara garis besar untuk mengetahui partisipasi masyarakat kelurahan Ciroyom dalam penanganan *Covid-19* melalui PIPPK pada empat tahap yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evaluasi untuk menjadi bahan evaluasi pelaksanaan PIPPK

kedepannya. Adapun hasil dari penelitian disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penanganan *covid-19* melalui PIPPK di Kelurahan Ciroyom dilaksanakan dengan inovasi dan kerjasama antar masyarakat dan adanya partisipasi penuh masyarakat dalam mengatasi besarnya dampak pandemi *Covid-19* melalui berbagai kegiatan yang telah dilakukan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti dimana menitik beratkan partisipasi masyarakat dalam rangka memutus rantai penyebaran virus *Covid-19*.

